

TESIS

URGENSI *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN PADA PROSES PERSIDANGAN

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Program Kekhususan: Hukum Pidana



Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.

Dr. YOSERWAN, S.H., M.H., LL.M.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

URGENSI *AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN PADA PROSES PERSIDANGAN

*Fenny Nindia Putri, 2220113021, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 124 Halaman, 2025*

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali menghadapi tantangan kompleks dalam proses pembuktian karena keterbatasan alat bukti formal yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP lama maupun Pasal 235 ayat (1) KUHP baru. Keterbatasan ini berpotensi menghambat penemuan kebenaran materiil dan mencederai rasa keadilan substantif masyarakat, terutama dalam perkara-perkara yang sarat akan isu hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, atau kepentingan publik luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana urgensi *amicus curiae* secara yuridis dalam peradilan di Indonesia? (2) Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia? serta (3) Bagaimana urgensi pembaharuan hukum terkait *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis keadilan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi yuridis *amicus curiae*, kedudukan hukumnya saat ini dalam sistem hukum acara pidana, serta merumuskan urgensi pembaharuan regulasi masa depan demi menciptakan peradilan yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (UD 1945, KUHP lama, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, UU Kekuasaan Kehakiman), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, doktrin hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Urgensi yuridis *amicus curiae* sangat tinggi sebagai instrumen penggalan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat guna menyeimbangkan kekakuan legal-formal hukum acara; (2) Kedudukan hukum *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana saat ini belum diakui sebagai alat bukti formal melainkan dikategorikan sebagai keterangan ahli tambahan (sub-sistem pembuktian logis) yang berfungsi memperkaya keyakinan hakim (*conviction raisonnée*) guna mencegah *error in persona* atau *malicious prosecution*; dan (3) Pembaharuan hukum terkait *amicus curiae* mutlak diperlukan dalam sistem peradilan pidana masa depan untuk memberikan kepastian hukum prosedural melalui penentuan mekanisme penyaringan (*filter*), kualifikasi pengaju, batasan jumlah, serta imunitas hukum bagi pengaju demi mengaktualisasikan keadilan substantif yang responsif dan demokratis.

Kata kunci: *Amicus curiae*, pembuktian pidana, hakim, keadilan substantif.

THE URGENCY OF AMICUS CURIAE (FRIENDS OF THE COURT) IN PROVING JUSTICE-BASED CRIMINAL ACTS IN THE TRIAL PROCESS

Fenny Nindia Putri, 2220113021, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 124 pages, 2025

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia often faces complex challenges in the evidentiary process due to the limitations of formal evidence strictly regulated under Article 184 paragraph (1) of the old Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 235 paragraph (1) of the new Code. These limitations potentially obstruct the discovery of material truth and undermine substantive justice, especially in complex cases involving human rights, environmental issues, or public interests. Based on this background, this study formulates three main problem statements: (1) What is the juridical urgency of amicus curiae in the Indonesian judiciary? (2) What is the legal position of amicus curiae within the criminal evidentiary system in Indonesia? and (3) What is the urgency of regulatory reform regarding amicus curiae in a justice-based criminal evidentiary system? This study aims to deeply analyze the juridical urgency of amicus curiae, its current legal standing, and the urgency of future regulatory reform to establish an inclusive and comprehensive criminal justice system. The research methodology applies a doctrinal/juridical-normative approach with a descriptive-analytical nature. The data source comprises secondary data, including primary legal materials (the 1945 Constitution, the old Criminal Procedure Code, Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code, and the Judicial Power Law), secondary materials (legal literature, journals, expert doctrines), and tertiary materials (legal dictionaries). Data collection was conducted through library research and document studies, followed by qualitative content analysis. The results of the study reveal that: (1) The juridical urgency of amicus curiae is fundamentally high as an instrument to dig out substantive justice values within society, balancing the rigidity of legal-formal procedures; (2) The current legal position of amicus curiae is not recognized as formal evidence but rather functions as an additional expert opinion or logical subsystem to enrich the judge's rational conviction (conviction raisonnée) to prevent error in persona or malicious prosecution; and (3) Regulatory reform regarding amicus curiae is urgently needed to provide procedural legal certainty, specifying strict filtering mechanisms, applicant qualifications, maximum submissions, and legal immunity for applicants to ensure responsive, fair, and democratic judgments.

Keywords: *Amicus curiae, criminal proof, judge, substantive justice.*